

The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. A large, solid green oval is positioned in the center, containing the main text. A thick, dark gray curved line sweeps across the bottom left of the green oval.

Reformasi Fiskal : Necessary Condition untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas.

Sri Mulyani Indrawati dan Mohamad Ikhsan _
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Outline Kuliah



Beberapa Isu Penting dalam Kebijakan Fiskal (MI)



Transformasi Struktural dan Penerimaan Negara (MI)



Reformasi Fiskal untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan dan Pemerataan (SMI)

Isu fiskal- Indonesia- terkini

Analisis fiscal sustainability Indonesia: aman; kondisi fiskal dapat berubah jika tidak dikelola secara prudent.

- **Primary Balance telah mengalami defisit sejak tahun 2013.**
 - Apa arti primary balance deficit?
- **Dominasi subsidi energi -> mengurangi belanja infrastruktur**
- **Krisis ekonomi dunia belum selesai.** Krisis dapat mengubah peta APBN.
 - Sebelum tahun 1997, rasio utang pemerintah 20% dari PDB dan didominasi utang luar negeri. Krisis 1998 telah menyebabkan peningkatan rasio utang pemerintah mencapai 100% pada tahun 2000 sebelum turun secara bertahap menuju level sekarang.
- **Balance Sheet Pemerintah belum memasukkan contingent liability.**
- **Transparansi anggaran : implicit subsidy energy dibalik neraca Pertamina dan PLN**

Desentralisasi pemerintah mengubah pola kendali anggaran – khususnya belanja ke daerah dan desa

Debt Dynamic

5.15 Turn next to debt dynamics. The basic equation for debt sustainability is:

$$d_t - d_{t-1} = pd_t - \frac{g_t - r_t}{1 + g_t} * d_t \quad (1)$$

where:

d_t refers to the debt/GDP ratio in period t ;

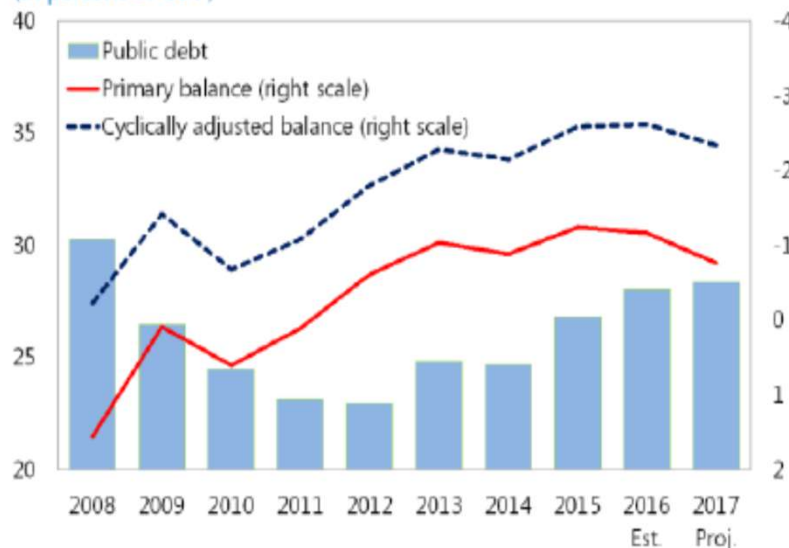
pd_t the primary deficit in period t ;

g_t the nominal GDP growth rate; and

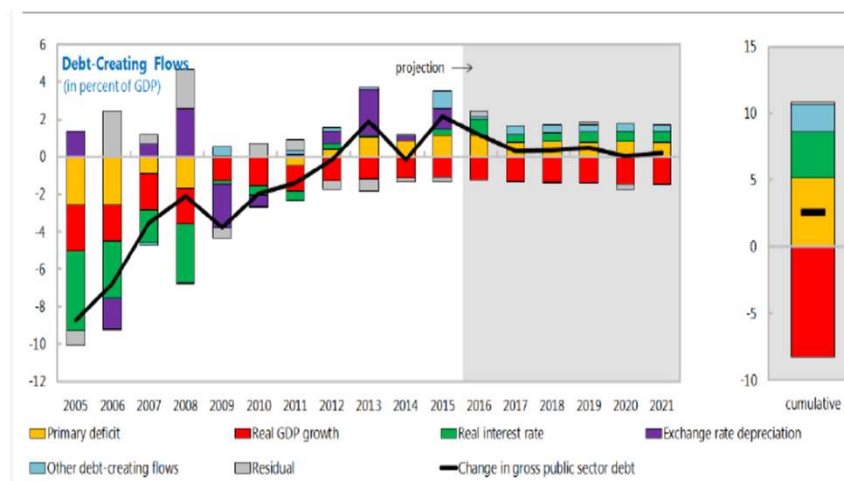
r_t the nominal effective rate of interest (borrowing cost) on government debt.

Fiscal Sustainability: Indonesia under control

Public Debt, Primary, and Cyclically Adjusted Balance
(In percent of GDP)



Sources: Indonesian authorities; and IMF staff estimates and projections.



Source: IMF staff.

1/ Public sector is defined as general government.

2/ Based on available data.

3/ EMBIG.

4/ Defined as interest payments divided by debt stock (excluding guarantees) at the end of previous year.

5/ Derived as $[r - \pi(1+g) - g + ae(1+r)] / (1+g + \pi + g\pi)$ times previous period debt ratio, with r = interest rate; π = growth rate of GDP deflator; g = real GDP growth rate;

a = share of foreign-currency denominated debt; and e = nominal exchange rate depreciation (measured by increase in local currency value of U.S. dollar).

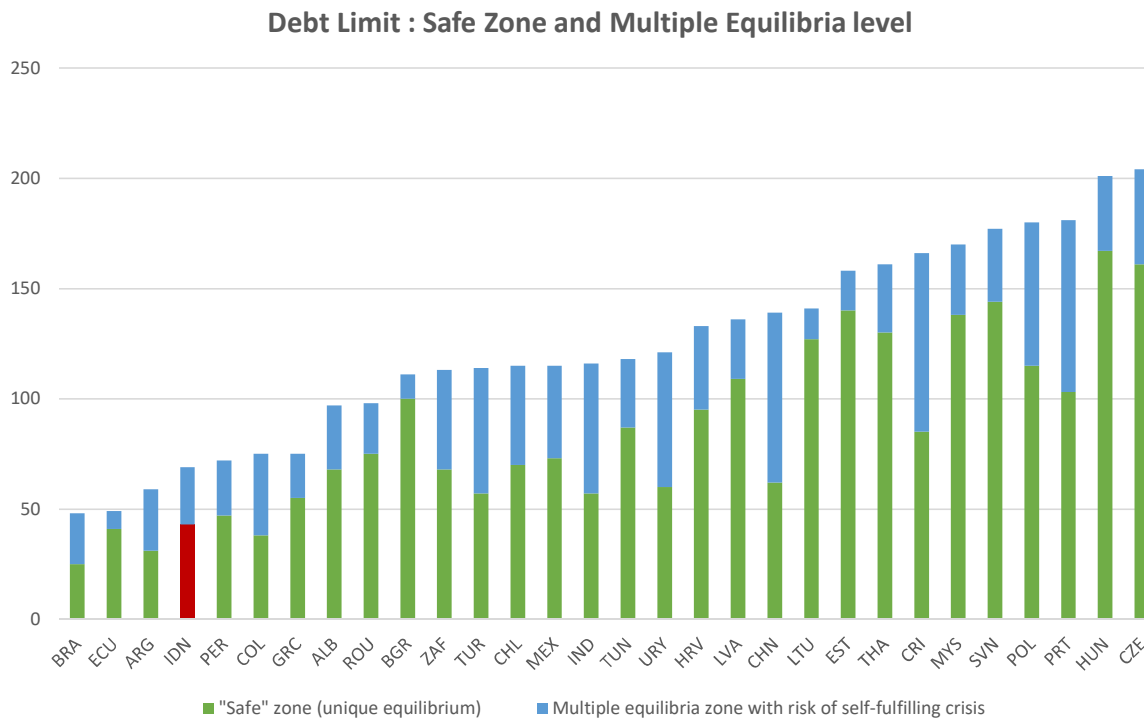
6/ The real interest rate contribution is derived from the numerator in footnote 5 as $r - \pi(1+g)$ and the real growth contribution as $-g$.

7/ The exchange rate contribution is derived from the numerator in footnote 5 as $ae(1+r)$.

8/ Includes asset changes and interest revenues (if any). For projections, includes exchange rate changes during the projection period.

9/ Assumes that key variables (real GDP growth, real interest rate, and other identified debt-creating flows) remain at the level of the last projection year.

Debt low ...so is the estimated debt limit



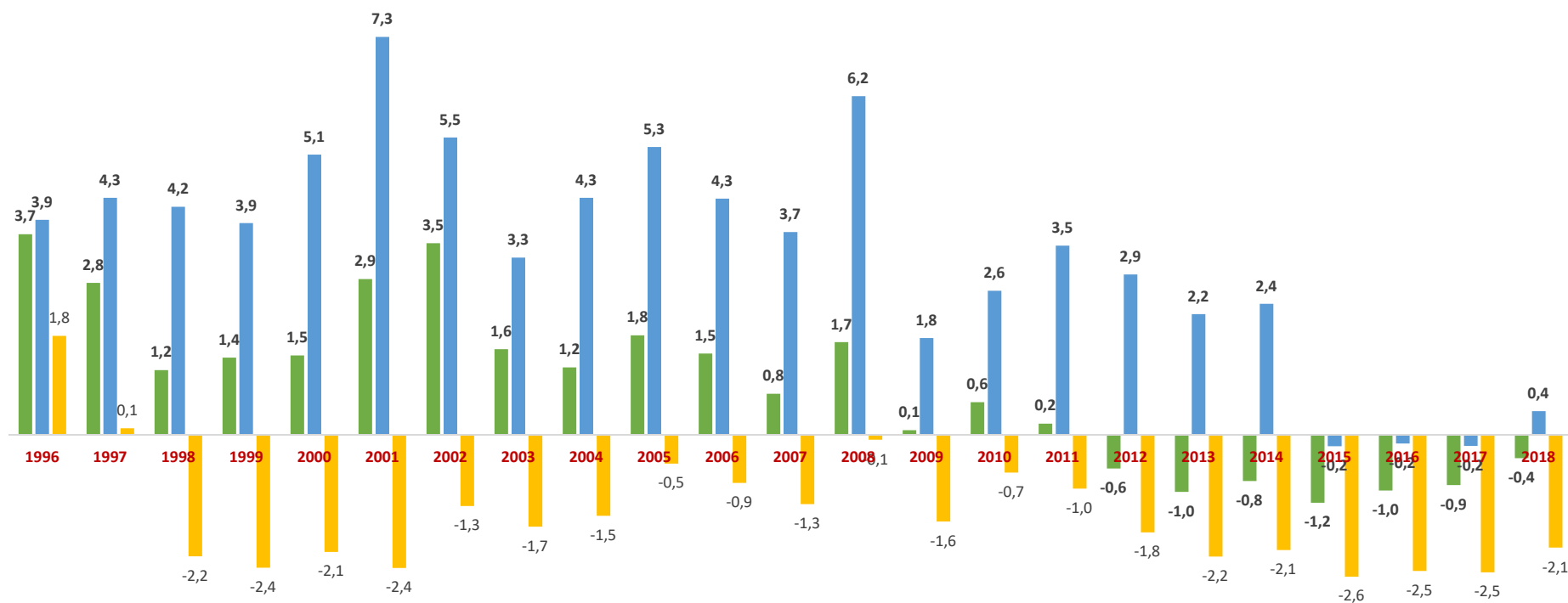
- Walaupun stok utang pemerintah rendah, tetapi “safe zone” dari utang pemerintah juga rendah yaitu 43 % dari GDP
- Di atas 43 persen, peluang untuk menuju self-fulfilling crisis meningkat.
- Di atas 69 %, simulasi ini menunjukkan utang Indonesia akan default.

Sumber: J.-M. Fournier and M. Bétin (2018), “Limits to debt sustainability in middle-income countries”, *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1493, OECD Publishing, Paris.

Indonesia: Primary Balance, 1996-2017

(% of GDP)

■ Primary balance ■ Primary Balance + Energy Subsidy ■ overall balance



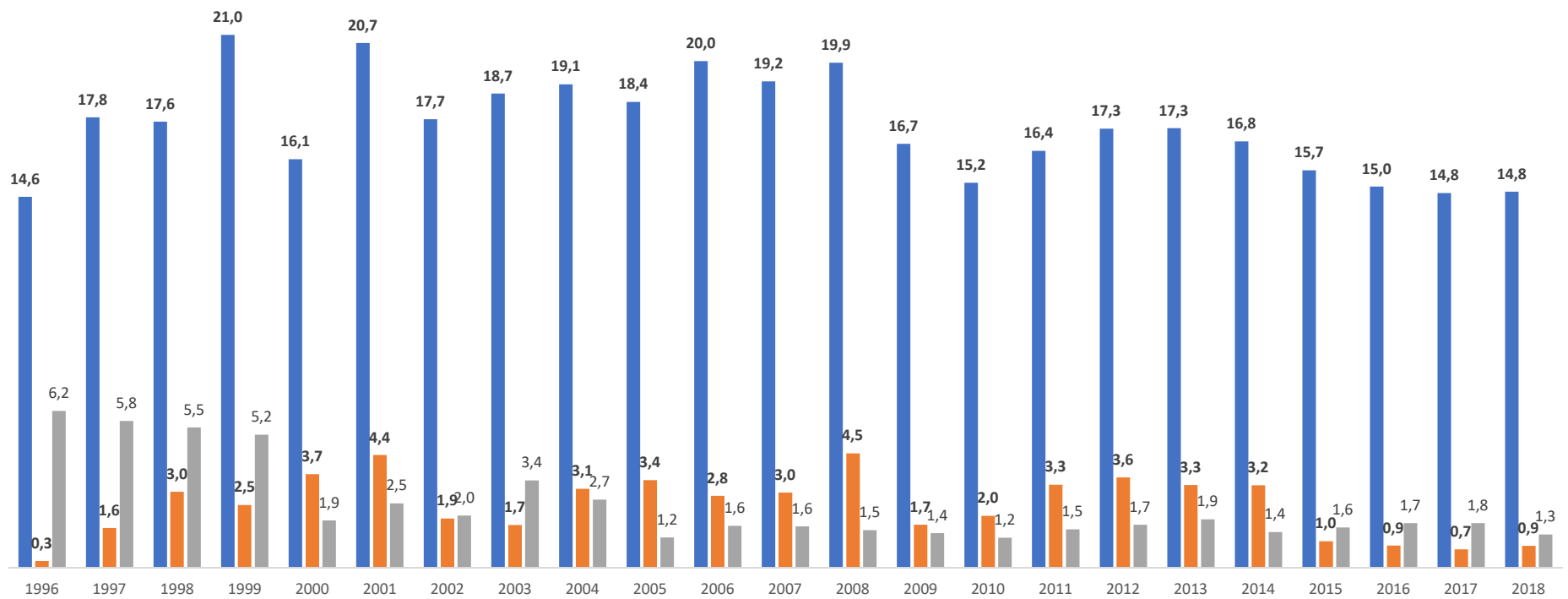
Belanja negara

- **Belanja negara – masih terbatas**

- **Fungsi alokasi** – mendorong pertumbuhan terbatas – kebutuhan minimal untuk membiayai infrastruktur tidak terpenuhi.
- **Fungsi stabilisasi** – shock absorber (counter cyclical) – APBN kita neither pro cyclical nor counter cyclical
- APBN juga **belum efektif dalam mengurangi distribusi pendapatan**. Bahkan ada kecenderungan beberapa komponen dalam APBN cenderung *inequality increasing*. Ibarat seharusnya berfungsi sebagai air yang diharapkan memadamkan api, komponen APBN tersebut dewasa ini lebih menjadi kerosin yang memperbesar api

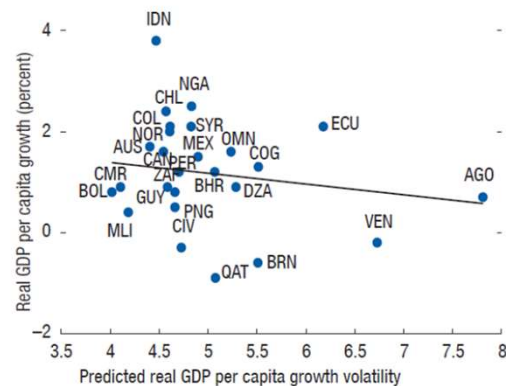
Indonesia : spending trend 1996-2018 (% of GDP)

■ Total spending ■ Energy subsidy ■ Capital Spending



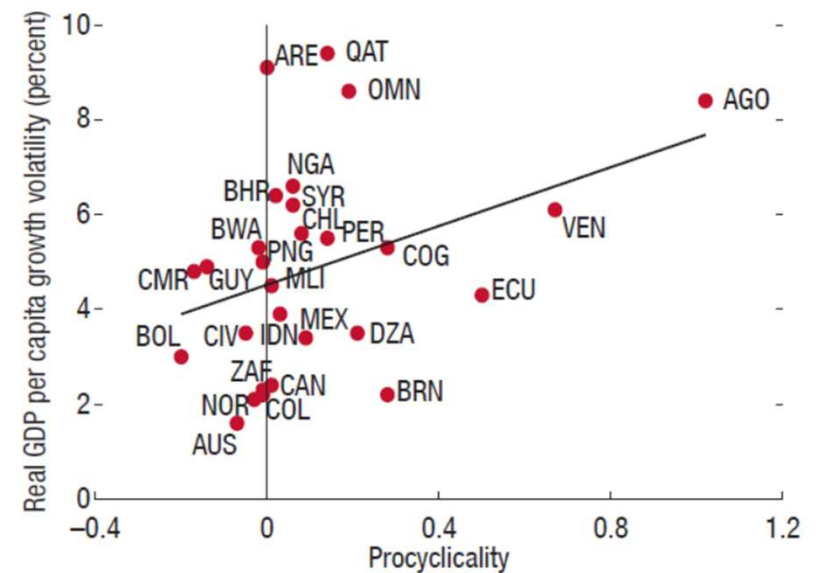
Pengaruh Procyclicality

2. Procyclicality and Output Growth



Source: IMF staff estimates.
Note: Data labels in the figure use International Organization for Standardization (ISO) country codes. Countries with at least 30 real GDP per capita observations are reported. Procyclicality is measured using country-specific regressions of real expenditure growth rates on commodity price changes. Predicted real GDP per capita growth volatility is obtained from a linear regression on procyclicality. The sample period is 1972–2014, but length varies across countries.

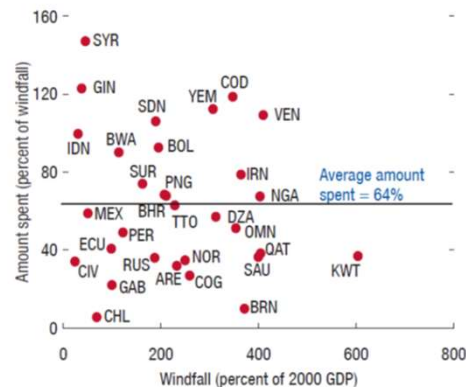
1. Procyclicality and Output Volatility



Ketergantungan terhadap sumber daya alam

Figure 1.11. Spending during the 2000–08 Boom

Commodity exporters spent a significant share of the 2000–08 large resource windfall.

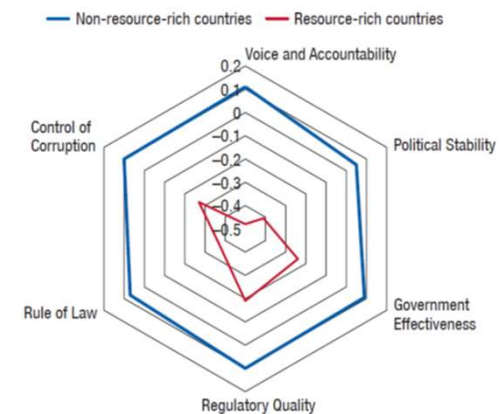


Source: IMF staff estimates.

Note: Data labels in the figure use International Organization for Standardization (ISO) country codes. Windfall is the cumulative increase in commodity revenues between 2000 and 2008; amount spent is the share of the windfall that was spent.

Figure 1.10. Institutional Quality in Resource-Rich Countries

Resource-rich countries tend to have lower institutional quality relative to other countries.



Sources: Worldwide Governance Indicators (World Bank) for 1996–2014; and IMF staff calculations.

Note: The figure shows the average levels of institutional quality for resource-rich and non-resource-rich countries with the same level of GDP per capita (sample average for resource-rich countries).

Reformasi Fiskal menjadi necessary dan tidak bisa di tunda



Pengeluaran pemerintah harus ditingkatkan → untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sistem proteksi sosial.



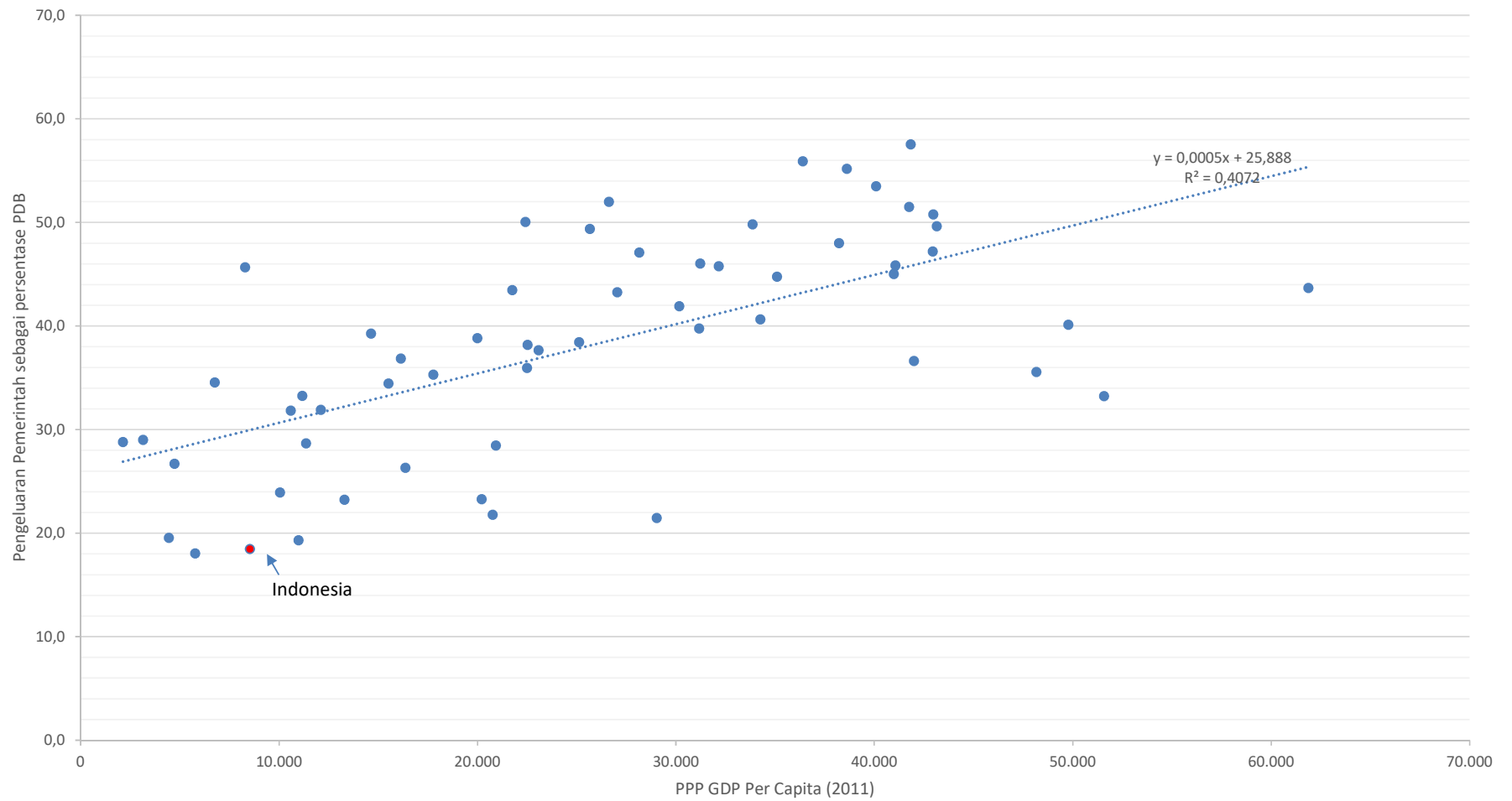
Alokasinya harus diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (spending multiplier yang lebih tinggi) dan memperbaiki distribusi pendapatan.



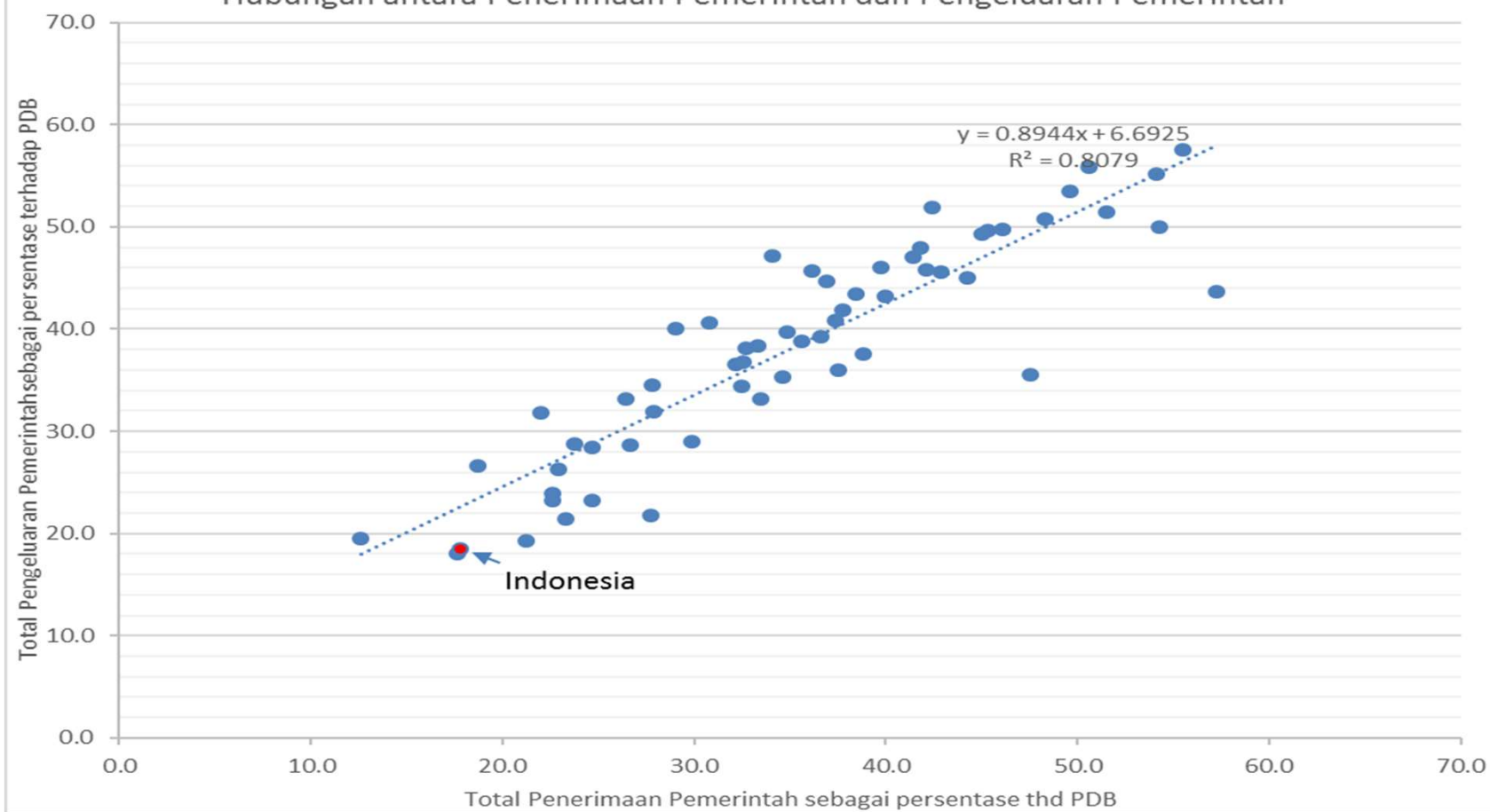
Untuk meningkatkan pengeluaran – **penerimaan pemerintah harus ditingkatkan.**

Rasio pajak/GDP Indonesia terlalu rendah

Gambar 1: Pengeluaran Pemerintah sebagai Persentase terhadap GDP Per Kapita (2011 PPP), 2011



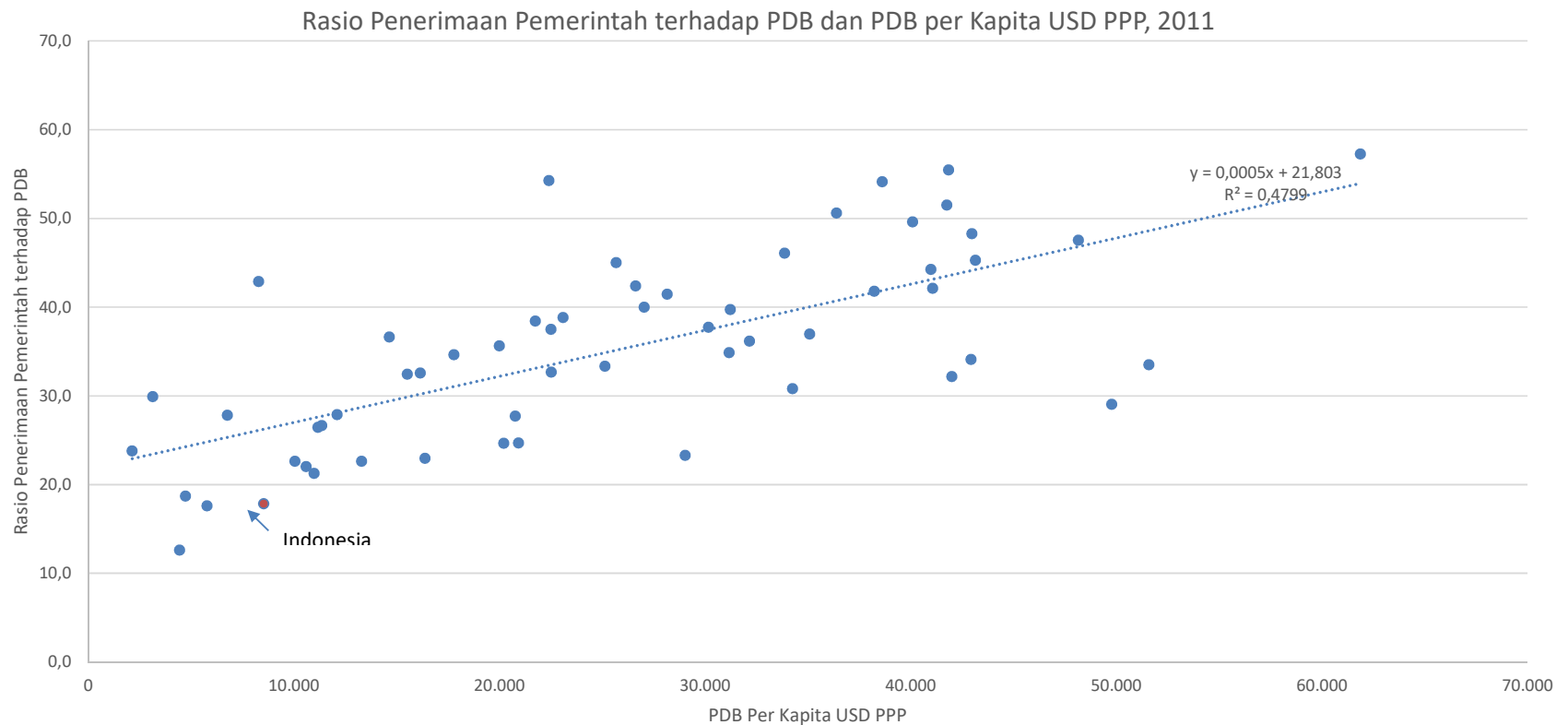
Hubungan antara Penerimaan Pemerintah dan Pengeluaran Pemerintah



Transformasi Struktural dan Penerimaan Negara

- Penerimaan Negara
 - Penerimaan Perpajakan
 - Pajak Langsung : Pajak Penghasilan, PBB
 - Pajak Tidak Langsung: PPN, Cukai
 - Pajak Perdagangan Internasional : Beamasuk, beakeluar
 - Penerimaan Bukan Pajak
 - Penerimaan Sumber Daya Alam: Migas dan Migas
 - Dividen BUMN

Rasio Penerimaan Pemerintah terhadap PDB meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita



Penerimaan
Negara per
PDB
meningkat
sejalan
dengan
peningkatan
pendapatan
per kapita

Pengaruh Peningkatan
Basis Pajak

Perbaikan dalam
Administrasi
Penerimaan Negara
dan penegakan hukum



Perluasan Basis Penerimaan: Determinan



Pajak Langsung dan Transformasi Struktural

- Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung kepada wajib pajak
 - Pajak Penghasilan – pribadi dan perusahaan
 - Pajak Kekayaan
 - Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Langsung dan Transformasi Struktural

- Pajak langsung meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan per kapita karena :
 1. Ciri pajak pendapatan dikenakan jika mencapai batas pendapatan tertentu (Pendapatan Kena Pajak)
 - Kenaikan pendapatan per kapita akan meningkatkan jumlah wajib pajak baik dari perseorangan maupun perusahaan
 2. Sifat Progresifitas PPh – rate bertambah dan jumlah orang atau unit usaha yang membayar dengan rate yang lebih tinggi juga meningkat.
 3. Fungsi dari perkembangan dunia usaha. Basis pajak terkait dengan sumber penerimaan pendapatan masyarakat : gaji/upah, sewa, bunga, dividen dan keuntungan. Perkembangan pembangunan akan memperluas basis pajak ke arah non labor income.
 4. Spesialisasi dan formalisasi ekonomi sejalan dengan peningkatan perkapita
- Keempat faktor di atas menyebabkan elastisitas pendapatan pajak langsung lebih besar dari 1

Pajak tidak langsung

- Pajak ini mempunyai dua ciri dasar:
 1. Dikenakan terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan
 2. Dikenakan pada barang bukan kebutuhan pokok.
- Pajak ini cenderung menonjol pada saat pendapatan per kapita masih rendah

Pajak tidak langsung meningkat sejalan dengan peningkatan per kapita



Peningkatan per kapita mengubah struktur konsumsi masyarakat ke barang bukan kebutuhan pokok

Ingat Hukum Engel – elastisitas pendapatan konsumsi bukan kebutuhan pokok lebih besar dari satu.

- Apa implikasinya terhadap elastisitas pendapatan pajak tidak langsung?



Spesialisasi mendorong perdagangan – barang yang diproduksi akan meningkat – basis pajak meningkat.



Pajak tidak langsung lebih mudah dipungut.



Peningkatan barang yang dipasarkan.



Urbanisasi – kegiatan sektor jasa transportasi



Tingkat partisipasi perempuan meningkat : porsi makanan 1/2 jadi dan jadi dan makan di luar rumah meningkat.

Perbaikan dalam Tax Administration



Tax administration menjadi lebih baik akibat baik perbaikan dalam administrasi pemerintah maupun formalisasi perusahaan.



Kemampuan pemungutan pajak membaik sejalan dengan perbaikan pendapatan per kapita.

Kapasitas
pegawai pajak
Penggunaan IT



Formalisasi perusahaan – perbaikan sistem pembukuan

Reformasi Fiskal

To be continued